

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak dengan serta merta tanpa mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu. Pada studi ini dipilih beberapa kajian-kajian yang menurut Peneliti dinilai sesuai dan dapat menunjang penelitian lanjutan. Di antaranya berupa artikel jurnal dan skripsi yang ditulis dengan fokus penelitian yang mencantumkan tema yang mencakupi persoalan kesadaran dan lingkungan, juga aktivisme digital/*digital activism*.

Pertama, skripsi yang berjudul “Aktivisme Digital dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Kasus Amnesty International Indonesia)” ditulis oleh Brillyanto pada tahun 2021. Tujuan penelitian skripsi ini menitikberatkan pada analisis sejauh mana kontribusi konten-konten digital terhadap mobilisasi partisipan dalam gerakan sosial. Hasil penelitian Brillyanto membenarkan bahwa kegiatan aktivisme digital yang dilakukan oleh pihak Amnesty International Indonesia cenderung memberikan banyak kontribusi yang positif. Seperti misalnya memasifkan gerakan-gerakan aktivisme yang dilakukan oleh Amnesty Indonesia. Selain itu, berdasarkan informasi-informasi yang disebarkan oleh Amnesty International Indonesia, terbukti berhasil membuat isu-isu HAM di Indonesia diterima dengan baik oleh masyarakat umum (Brillyanto, 2021).

Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yang berbeda, dimana Brillyanto menekankan pada isu yang berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) dengan memilih organisasi bernama Amnesty International Indonesia. Dari segi persamaan, terdapat pada persamaan fokus penelitian pada aktivisme yang berbasis digital, ditambah dengan penggunaan kerangka teoritis yang menggunakan teori mobilisasi sumberdaya.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Isnata dan Nugroho pada tahun 2018 dengan judul “Digital Activism: The Utilisation of Social Media Instagram

@pulihkanjakarta in Campaigning for Environmental Issues”. Berdasarkan artikel tersebut kegiatan aktivisme digital dalam sosial media Instagram menunjukkan dapat memberikan rangkaian pengaruh yang cukup signifikan. Ini tentu sesuai dengan tujuan penelitian awal yang telah ditentukan, mengenai bagaimana strategi dan penggunaan sosial media oleh Walhi Jakarta untuk mengkampanyekan isu lingkungan. Akan tetapi, pada kajian tersebut ditekankan pula bahwasannya hal-hal teknis seperti visual, narasi serta strategi aktivisme digital perlu lebih diperhatikan dan dikembangkan. Sebab, ketiga hal tersebut berpengaruh terhadap visibilitas *user* atau pengguna dalam mencerna informasi yang dibagikan. Lebih lanjut Isnata dan Nugroho menyebutkan bahwa tiga aspek yang berpengaruh tersebut dapat diperbaiki dengan menganalisis berdasarkan data-data digital (Isnata & Nugroho, 2018).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya artikel Isnata dan Nugroho lebih membatasi penggunaan aktivisme digital pada platform Instagram dan tanpa menggunakan analisis teori, sehingga hanya mengupas bagian bagaimana platform media sosial digunakan dalam sebuah kampanye atau aktivisme. Terlepas pada perbedaan tersebut, tulisan Isnata dan Nugroho sama-sama mengungkap pemanfaatan atau penggunaan aktivisme digital yang dilakukan oleh Walhi cabang Jakarta dalam mengkampanyekan isu-isu lingkungan.

Ketiga, merupakan penelitian berupa artikel jurnal berjudul “Analisis Dinamika Aktivisme Digital di Indonesia: Studi Kasus #Tolakpolitikdinasti Dalam Membangun Kesadaran Publik” dengan penulis Priageng et al., pada tahun 2024. Penulisan kajian tersebut dilatarbelakangi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak gerakan aktivisme digital yang bertagar #tolakpolitikdinasti berpengaruh pada pembangunan kesadaran publik masyarakat di Indonesia. Tujuan penelitian Priageng dan kawan-kawan, nyata memberikan sejumlah jawaban, yang terkandung dalam hasil yang menyimpulkan jika aktivisme digital/*digital activism* terutama dalam penelitian ini berupa gerakan dengan *hashtag* #tolakpolitikdinasti telah memainkan peran yang cukup signifikan, ini ditandai dengan munculnya

berbagai tanggapan masyarakat terhadap praktik politik dinasti yang menjadi isu permasalahan publik (Priageng et al., 2024).

Beranjak dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwasannya penelitian Priageng et al., menggunakan teori yang sama dalam analisisnya dengan teori mobilisasi sumberdaya. Tidak hanya itu, penelitian ini juga tidak membatasi ruang “digital” hanya pada satu platform tertentu sebagai objek penelitiannya, artinya aktivisme digital yang dilakukan dapat terjadi di bermacam platform yang tersedia. Namun, yang menjadi batas pada fokus penelitian ini adalah gerakan sosial yang bertajuk #tolakpolitikdinasti sebagai batasan atau ranah aktivisme yang digencarkan.

Berdasarkan pada tinjauan atas tiga penelitian sebelumnya di atas, Peneliti melihat bahwasannya masih terdapat banyak ruang-ruang kosong (*gap*) untuk dilakukannya kajian mengenai aktivisme digital. Dalam mencari penelitian terdahulu, Peneliti mengalami kendala untuk mencari penelitian yang membahas aktivisme digital pada organisasi atau gerakan sosial yang berbasis tema lingkungan hidup. Ini bisa dilihat dengan adanya dua penelitian terdahulu yang meninjau aktivisme digital pada tema-tema politik. Oleh karenanya, objek penelitian aktivisme digital pada gerakan sosial lingkungan dipandang Peneliti perlu mendapatkan atensi dan kajian yang lebih.

Selanjutnya, pada pemilihan subjek penelitian, Peneliti melihat bahwa adanya penelitian serupa yang dilakukan di Walhi Jakarta. Inilah yang kemudian mengantarkan pada keputusan Peneliti untuk menentukan Walhi Jawa Barat sebagai subjek penelitian. Terlebih, masih sedikitnya penelitian yang dilakukan di Walhi Jawa Barat. Terutama penelitian yang membahas mengenai aktivisme digital yang dilakukan oleh Walhi Jawa Barat, yang belum pernah dilakukan sama sekali. Terakhir, alasan penguat lainnya ialah pada penelitian yang dilakukan di Walhi Jakarta belum menggunakan teori mobilisasi sumber daya yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zald.

B. Kesadaran Lingkungan

1. Pengertian Kesadaran Lingkungan

Menurut bahasa kata “kesadaran” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*awareness*” didefinisikan oleh Cambridge *Dictionary* (2025) sebagai berikut “*knowledge that something exists, or understanding of a situation or subject at the present time based on information or experience*”. Pengertian tersebut memberikan pemahaman jika kesadaran atau *awareness* merupakan pengetahuan akan keberadaan sesuatu baik itu berupa keadaan ataupun subjek yang didasari oleh informasi dan pengalaman. Pengertian tersebut juga memiliki kemiripan dengan pengertian versi *Oxford English Dictionary* (dalam Hastjarjo, 2020) menyebutkan *awareness* atau kesadaran sebagai pengetahuan bersama, keyakinan internal, keadaan mental seseorang yang menyadari terhadap sesuatu, dan juga keadaan mengenali tindakan atau perasaan pribadi.

Menurut para ahli, misalnya Simorangkir (dalam Jamanti, 2014) kesadaran secara dasar artinya berpikir, ketika misalnya perubahan di masyarakat hendak dilakukan baik itu dalam ukuran yang besar maupun kecil, menurutnya langkah pertamanya ialah dengan merubah pola berpikir, karena kesadaran merupakan hasil akhir dari cara atau gaya pikir masyarakat. Solso (dalam Here & Priyanto, 2014) beranggapan bahwa kesadaran yang dalam Bahasa Inggris berarti “*awareness*” didefinisikan sebagai kesiagaan seorang individu pada kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya baik itu sifatnya terjadi secara kognitif, pikiran, perasaan, dan bahkan hal-hal yang mengarah pada keadaan fisik.

Beranjak pada pengertian kata selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan sebuah kombinasi antara kondisi fisik seperti sumberdaya alam dengan kelembagaan ciptaan manusia terkait bagaimana lingkungan tersebut digunakan (Adiwijaya & Berkat, 2020). Menurut Soemaatmaja (dalam Mutakin, 2018) lingkungan adalah semua kondisi yang disekitar makhluk hidup yang memiliki pengaruh pada pertumbuhan dan karakternya. Berbeda dengan Soemaatmaja, Otto Soemarwoto (dalam Effendi et al., 2018) mengartikan lingkungan atau lingkungan hidup sebagai segala sesuatu yang ada melekat pada setiap makhluk hidup atau

organisme yang berpengaruh pada kehidupan makhluk tersebut. Selain pengertian lingkungan berdasarkan para ahli, menurut (Mutakin, 2018) lingkungan juga dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan aspek manusia antara lain:

a. Lingkungan Alam (*Natural Environment*)

Lingkungan alam adalah seluruh keadaan atau realitas alam baik itu gejala dan proses yang terjadi disekeliling manusia yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan karakter manusia. Gejala dan proses tersebut tentu dapat terjadi dengan sendirinya maupun terjadi disebabkan oleh faktor eksternal oleh manusia.

b. Lingkungan Sosial (*Social Environment*)

Konteks lingkungan sosial di sini merupakan lingkungan manusia dengan manusia lainnya. Baik itu individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok, juga antara individu dan kelompok. Yang sudah barang tentu antara kelompok dan individu tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupannya.

c. Lingkungan Budaya (*Cultural Environment*)

Terkait budaya, ini merujuk pada seluruh hasil atau kondisi budaya, yang dalam bentuknya bisa berupa hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia atau kelompok yang dalam perkembangannya hadir di sekeliling kelompok dan manusia yang bersangkutan.

Pemaparan tiga aspek terkait, mengantarkan Peneliti untuk menentukan fokus penelitian ini pada aspek lingkungan yang bersifat pada alam (*Natural Environment*). Ini didasari oleh data-data terkait kerusakan lingkungan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, yang tentu pada hubungannya berpengaruh terhadap perkembangan dan aktivitas hidup masyarakat.

Berdasarkan penjelasan terkait kedua kata “kesadaran” dan “lingkungan” di atas dapat dipahami secara sederhana bahwa kesadaran lingkungan merupakan keadaan seorang individu atau masyarakat yang menyadari dan memiliki pengetahuan akan gejala dan proses alam yang terjadi disekitarnya. Namun, tidak hanya terpaku pada pengertian tersebut, definisi Peneliti dilengkapi pula oleh para

ahli lainnya yang menawarkan pandangan yang lain. Misalnya Yeung (dalam Hernawati & Saputro, 2020) berpendapat jika kesadaran lingkungan adalah ukuran kemampuan seseorang dalam memahami sifat, proses, dan masalah lingkungan, yang tidak luput dari tingkat kepedulian seseorang sehingga dapat berkomitmen dalam berperilaku terhadap lingkungan. Potabenko (dalam Chairunnisa, 2014) menambahkan jika kesadaran lingkungan juga merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari terkandungnya hubungan antara aktivitas manusia dengan keadaan lingkungan sekitarnya, sehingga memicu tercipta lingkungan yang aman dan sehat. Pada pendapat yang berbeda, Neolaka (dalam Here & Priyanto, 2014) menyatakan kesadaran lingkungan adalah keadaan tergeraknya jiwa terhadap persoalan lingkungan yang tercerminkan dari perilaku dan tindakan individu.

Terakhir, dapat diambil kesimpulan jika kesadaran lingkungan adalah kemampuan seorang individu maupun kelompok dalam menyadari dan memahami terkait, sifat, proses, masalah, gejala, lingkungan alam disekitarnya. Dengan demikian diperoleh pengetahuan mengenai lingkungan alam, pemahaman akan adanya hubungan antara aktivitas manusia dengan keadaan lingkungan di sekitar. Sehingga dengan segenap kesadaran lingkungan yang telah terbentuk menumbuhkan rasa untuk bergerak dengan perilaku atau tindakan yang menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman.

2. Dimensi Kesadaran Lingkungan

Setelah mengetahui makna dari kesadaran lingkungan, diperlukan juga pengetahuan akan ruang atau dimensi dari kesadaran lingkungan yang pada pembahasannya ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Menurut Sanchez dan Lafuente (dalam Aulia, 2019) ia membagi kesadaran lingkungan pada tiga dimensi antara lain:

a. *General Belief* (Kepercayaan Umum)

General belief dalam konteks ini merupakan kepercayaan atau keyakinan terkait cara pandang pada keadaan lingkungan yang di dalamnya mengandung persepsi seseorang pada kondisi lingkungan yang rusak yang menciptakan keserasian lingkungan. Dalam perspektif yang sederhana

kepercayaan ini juga berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang terhadap lingkungan.

b. *Personal Attitudes* (Etika Pribadi)

Personal attitudes berarti berkenaan bagaimana sikap seseorang pada realitas keadaan lingkungan sekitarnya yang menurut Sanchez dan Lafuente dimensi kedua ini lebih mengutamakan pada nilai dan etika personal/pribadi.

c. *Information knowledge* (Informasi/Pengetahuan)

Dimensi terakhir ialah informasi dan pengetahuan, yang berkenaan seberapa tahu dan pahami seseorang terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi. Pengetahuan yang dimaksud dapat diperoleh berdasarkan berbagai sumber.

Atas tiga dimensi mengenai kesadaran lingkungan yang dikembangkan oleh Sanchez dan Lafuente, peningkatan dalam kesadaran lingkungan pada dasarnya mampu merubah kepercayaan (*general belief*) masyarakat terhadap isu lingkungan yang terjadi, transformasi perubahan sikap dan etika terhadap lingkungan, dan ketiga menjadikan tahu atau memiliki pengetahuan dan informasi (*well informed*) mengenai keadaan dan isu lingkungan.

C. Aktivisme Digital

1. Pengertian Aktivisme Digital

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengertian aktivisme digital Peneliti berusaha untuk membedah aktivisme digital dengan menjelaskan satu-persatu pengertian dari setiap kata. Sebagai awal, Danuri (dalam Martins, 2022) berpandangan jika digital dalam pengertian tingkat dasar hanya sebuah sistem menghitung yang *advanced* dengan kecepatan yang tinggi dilengkapi oleh kemampuan untuk memproses berbagai bentuk informasi dalam format nilai-nilai numeris. Asal mula kata digital sendiri, berawal dari Bahasa Yunani “*digitus*” dalam Bahasa Indonesia diartikan jari jemari, yang dilatarbelakangi oleh 10 jari jemari manusia, sebab digital dalam penjabarannya terdiri atas sistem angka 1 dan 0 (sistem digital) dimana angka-angka tersebut mewakili informasi dengan sinyal

continuous (Aji, 2016). Kemunculan teknologi digital ini, yang pada akhirnya menciptakan, ruang, informasi yang berbasis digital saat ini.

Melanjutkan pembahasan sebelumnya kata kedua yakni “aktivisme” dalam rekam jejak historisnya merupakan istilah/*term* yang baru muncul pada tahun 70-an yang mereferensikan sebagai kemampuan untuk bergerak atau mengubah sejarah, yang kemudian didukung oleh pernyataan Jordan (dalam Cammaerts, 2013) yang menyebutkan jika aktivisme berperan sebagai penentu arah masa depan masyarakat. Selanjutnya Harlow pada Nasution (dalam Rochmawati & Alamiyah, 2024) menjelaskan aktivitas sebagai aksi dari sekelompok masyarakat dengan ide yang sama, dengan tujuan merubah status quo dan mengadvokasi isu lokal maupun global dilakukan secara progresif dan tidak. Lebih radikal, Joyce (dalam Rochmawati & Alamiyah, 2024) berpendapat aktivisme sebagai usaha untuk mendukung atau mencegah terjadinya pergantian status quo, tetapi dengan tujuan akhir yang sama, yaitu melindungi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat melalui ragam metode yang tidak terbatas meskipun masih mengandung cara-cara konvensional

Penjelasan kedua kata di atas memberikan gambaran kecil mengenai apa itu aktivisme digital. Yaitu, aktivisme digital berarti upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk merubah status quo, dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian masyarakat melalui sistem digital yang di dalamnya tersusun atas angka 0 dan 1 yang dapat menyampaikan berbagai informasi yang mendorong terjadinya perubahan di masyarakat. Pemahaman mengenai aktivisme digital diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan Joyce (dalam Chusna, 2021) bahwa aktivisme digital merupakan bentuk penggunaan teknologi informasi elektronik layaknya media sosial, email, bahkan *podcast* sekalipun yang memuat kegiatan berkampanye untuk perubahan sosial dan politik. Jauh luas lagi, Karatzogianni (dalam Özkula, 2021) menjelaskan aktivisme digital sebagai partisipasi politik yang kegiatannya berupa protes melalui jaringan digital oleh aktor-aktor non-negara. Pengertian dari kedua ahli tersebut diperkuat oleh pendapat Kaur (dalam Anisa, 2024) yang menegaskan jika aktivisme digital

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, begitu juga dengan sosial media sebagai platform utama dalam memparakan ide secara bebas.

Disimpulkan pengertian dari aktivisme digital atau *digital activism* adalah penggunaan perkembangan teknologi bersistem digital yang di dalamnya mencakup teknologi informasi dan komunikasi sehingga memunculkan misalnya wadah seperti sosial media untuk melakukan rangkaian tindakan protes terhadap status quo sehingga mendorong terjadinya perubahan pada masyarakat, aktivitas ini dapat berbentuk kampanye maupun advokasi yang dilakukan di sosial media sebagai platform utama untuk membagikan ide-ide tersebut secara bebas.

2. Kategori Aktivisme Digital

Menurut Van Laer dan Aeist (dalam Zahira & Hermanadi, 2020) aktivisme digital dibagi pada dua kategori sebagai berikut:

a. Aktivisme Berbasis Internet

Aktivisme berbasis internet ini merupakan model baru dibandingkan dengan aktivisme yang didukung oleh internet. Pada pengaplikasiannya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang sepenuhnya menggunakan internet atau berbasis virtual. Contoh aktivisme ini berupa *hacktivisme*, pembuatan website yang khusus untuk protes, juga dibuatnya petisi-petisi *online*.

b. Aktivisme dengan Dukungan Internet

Seperti pada nama kategorinya, bentuk aktivisme digital yang kedua merupakan aktivisme konvensional yang banyak dan sudah sering dilakukan oleh berbagai kalangan yang ditambah dan dibantu oleh internet. Pada bentuk-bentuk kegiatan layaknya aktivisme pada umumnya seperti demonstrasi, donasi uang, hingga aksi demonstrasi yang ekstrim contohnya perusakan properti dan vandalisme. Dapat dimaknai juga sebaliknya bahwasannya aktivisme digital sebagai upaya memanjang dari aktivisme maupun gerakan sosial yang bersifat *offline* (I. R. Putri, 2022).

Pembagian dua kategori di atas digunakan untuk memahami bentuk atau kategori mana yang hendak diutamakan dalam penelitian ini. Berdasarkan objek penelitian yang telah ditentukan, Peneliti akan menitikberatkan penelitian

aktivisme digital pada kategori “aktivisme yang didukung oleh internet” ini disebabkan karena Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat sebagai organisasi lingkungan tidak sepenuhnya melakukan aktivisme dan advokasi secara digital maupun daring.

3. Bentuk Aktivisme Digital

Tidak hanya dibagi pada dua kategori, aktivisme digital juga dibagi berdasarkan bentuk-bentuk pada pengaplikasiannya atau berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang menurut Vegh (dalam Rochmawati & Alamiyah, 2024) dibagi menjadi tiga poin sebagai berikut:

a. Aktivisme Digital untuk Advokasi Isu

Pertama, aktivisme dilakukan untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang masih jarang diketahui dan diperhatikan khalayak publik. Dengan memanfaatkan teknologi digital misalnya, memudahkan penyebaran informasi-informasi tersebut, sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bersama sehingga menuntut tanggung jawab dari pihak yang memiliki wewenang (pemerintah).

b. Aktivisme Digital untuk Mobilisasi/Organisasi

Melalui aktivisme digital seperti pada poin sebelumnya yang telah disebutkan, memberikan banyak kemudahan. Diantarannya adalah memudahkan untuk mengorganisir dan koordinasi untuk menindaklanjuti pada tindakan luring. Misalnya pada akhir dari kampanye di ranah digital, dibentuk juga kegiatan *offline* seperti demonstrasi.

c. Aktivisme Digital Aktif/Reaktif

Bentuk terakhir yakni reaktif atau aktif biasanya didasarkan pada tindakan aktivisme digital yang spontan. Ini dapat berupa tindakan yang berbentuk peretasan atau *hacking* pada pihak-pihak yang dituju dalam protes atau advokasi.

4. Faktor Pendorong Aktivisme Digital

Proses terbentuknya gerakan atau aktivisme secara digital tentu tidak terbentuk secara tiba-tiba. Melainkan, terdapat faktor-faktor pendorong maupun

pemicu sejak awal. Bruce Bimber (dalam Meidina & Rahmawati, 2023) membagi faktor pendorong tersebut sebagai berikut:

a. *Organization Prompted Behavior* (Perilaku yang Didorong oleh Organisasi)

Faktor pendorong pertama, merupakan tindakan aktivisme yang didorong oleh suatu organisasi. Pada kenyataannya organisasi-organisasi yang menginisiasi sebuah aktivisme berusaha untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, tanpa memandang jika seorang bukan individu termasuk bagian atau anggota organisasi tersebut.

b. *Socially Prompted Behavior* (Perilaku yang Didorong oleh Sosial)

Pendorong selanjutnya didasari oleh terjadinya aktivisme terlebih dahulu oleh banyak orang secara sosial. Ketika, misalnya seorang individu melihat satu isu yang sedang *trending*, terdorong untuk melakukan tindakan aktivisme yang serupa. Dalam pandangan yang lebih implisit, perilaku ini didorong berdasarkan kesepakatan (konsensus) masyarakat secara sosial.

c. *Self-Directed Behaviour* (Perilaku yang Didorong oleh Individu)

Faktor pendorong terakhir yakni, *self-directed behaviour* seperti pada judul sub-bab ini, tindakan atau perilaku aktivisme ini murni berdasarkan keinginan pribadi tanpa pengaruh organisasi maupun masyarakat secara umum. Perilaku menurut Bruce Bimber dilatarbelakangi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu.

Tiga faktor pendorong yang telah dipaparkan dalam sub-bab ini menjadi penguat bahwasannya memang terdapat bentuk aktivisme digital yang didorong atau diinisiasi oleh sebuah organisasi. Secara pelaksanaannya umumnya aktivisme digital yang diciptakan oleh organisasi tidak mengharuskan para partisipannya untuk termasuk dalam keanggotaan organisasi terkait.

D. Teori Mobilisasi Sumberdaya (*Resource Mobilization Theory*)

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Mobilisasi Sumber Daya. Peneliti melihat bahwa teori ini merupakan teori yang menarik untuk digunakan sebagai pisau analisis. Terlebih secara umum, Teori Mobilisasi Sumber Daya atau *Resource Mobilization Theory* menurut Buechler (dalam Sukmana,

2016) adalah salah satu teori yang cukup banyak digunakan dalam menganalisis gerakan-gerakan sosial. Sehingga Peneliti semakin yakin untuk mengaplikasikan teori mobilisasi sumber daya yang dikemukakan oleh McCarthy dan Zald pada penelitian ini.

Dalam latar belakangnya teori mobilisasi sumber daya berusaha menawarkan pandangan yang berbeda untuk melihat sebuah gerakan sosial. Pandangan fungsionalis menekankan bahwa para aktor gerakan sosial merupakan seseorang yang menyimpang atau “anomik”, adapun pandangan pluralis melihat bahwa gerakan sosial didasari atas faktor ketidakpuasan atau keluhan masyarakat (Edwards & Gillham, 2014). Beranjak pada dua pandangan tersebut para ilmuwan mobilisasi sumber daya berusaha memperhatikan dan mengkaji aktor-aktor rasional di balik gerakan sosial yang seringkali tidak ter-*expose* dalam keberhasilannya secara rasional mengelola dan mengorganisir sebuah gerakan sosial (Edwards & Gillham, 2014).

Pada dasarnya, McCarthy & Zald (1977) sebagai pelopor utama teori mobilisasi sumber daya mempertanyakan pemikiran bahwa gerakan sosial banyak berlandaskan atas keluhan atau rasa ketidakpuasan publik. Pertanyaan tersebut mengantarkan pada keyakinan bahwa faktor keluhan atau “*grievances*” bagi McCarthy dan Zald dianggap tidak sepenuhnya dapat berpengaruh, ini disebabkan karena keluhan memiliki tingkat kemudahan besar untuk dimanipulasi oleh para aktor gerakan sosial (McCarthy & Zald, 1977). Sebaliknya, yang harus lebih diperhatikan Adalah mengenai bagaimana para aktor-aktor gerakan sosial itu mengorganisir sebuah gerakan sehingga baik “*grievances*” maupun perubahan sosial yang dituju dapat tercapai (McCarthy & Zald, 1977).

Menguatkan pandangan sebelumnya, Waterman (dalam Sukmana, 2016) menyebutkan jika mobilisasi sumber daya secara fundamental berfungsi mengkaji rasionalitas perilaku gerakan sosial. Maka dari itu, dapat dipahami dengan sederhana bahwa teori mobilisasi sumber daya menekankan pada rasionalitasnya sebuah gerakan sosial, dibandingkan hanya memandangi sebuah gerakan sosial sebagai suatu hal yang muncul secara tiba-tiba. Lebih detail, Menurut Oberschall

(dalam Cahya, 2015) kata “mobilisasi” merujuk pada proses-proses dalam gerakan sosial, seperti pengumpulan kerumunan, kelompok, organisasi yang bertujuan pada satu tujuan bersama. Sebab salah satu analisis utama dari teori mobilisasi sumber daya ialah melihat perubahan masyarakat luas yang mula berperan sebagai *bystander* (penonton), kemudian menjadi *adherents* (pengikut), lalu meningkat ke *constituents* (pendukung), hingga menjadi *active participant* (Edwards & Gillham, 2014).

Menurut Klandermans (dalam Sukmana, 2016) terdapat setidaknya dua hal yang penting dalam gerakan sosial, yaitu faktor-faktor struktural (*structural factors*) dan ketersediaan sumber daya (*the availability of resources*). Faktor lainnya disebutkan juga ialah rasionalitas, sebagaimana penjelasan sebelumnya menekankan pada alasan rasional keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial (Asyahidda & Amaliya, 2022). Sehingga dapat dipahami juga jika teori ini berusaha menjelaskan bagaimana sebuah gerakan sosial dapat dioptimalkan melalui sumber daya yang dimiliki dengan tujuan tiada lain untuk meningkatkan pengaruh yang disebarkan kepada masyarakat (Santoso, 2015).

Bila ditelaah lebih lanjut, mobilisasi pun terbagi pada dua, yaitu mobilisasi konsensus dan mobilisasi aksi. Mobilisasi konsensus merujuk pada upaya untuk membangkitkan semangat gerakan sosial dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hamzah, 2022). Sebaliknya, mobilisasi aksi adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial dengan menuntut lebih banyak waktu, sumberdaya, dan keterampilan. Sebagai standar dari keberhasilan mobilisasi, ini dapat diidentifikasi perubahan status individu dari simpatisan menjadi partisipan aktif.

Selain pembagian jenis mobilisasi, Pichardo (dalam Triwibowo dalam Sukmana, 2016) berusaha mengembangkan model analisis pendekatan mobilisasi sumber daya, ia kemudian membagi teori mobilisasi sumber daya pada dua model analisis. Pertama, *The Political-Interactive Model*, sesuai dengan namanya model ini menitikberatkan perhatiannya pada dasar-dasar politis. Sederhananya, dalam model ini jaringan dan koneksi antar kelompok yang tertindas berperan penting

sebagai penentu keberhasilan gerakan sosial. Selain itu, keberhasilan sebuah gerakan sosial pada model ini besar juga ditentukan oleh sistem politik yang dianut oleh sebuah negara. Contohnya bila negara dibentuk se-represif mungkin, maka kecil kemungkinan gerakan sosial itu berhasil. Kedua, *The Organizational-Entrepreneur Model*, berbeda dengan model sebelumnya, model ini memfokuskan pada faktor pengelolaan sumber daya. Pichardo memandang bahwa pada model ini keberhasilan sebuah gerakan sosial disebabkan oleh dinamika organisasi (internal) tersebut, misalnya cara kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Terakhir, model ini menegaskan jika organisasi formal merupakan *carriers of social movements* atau pembawa gerakan sosial.

Sumber lain menguatkan, diantaranya yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Putra et al., (2021) yang membahas mengenai pemanfaatan sumber daya dalam gerakan yang menolak eksploitasi sumber daya alam di Sumatera Barat menyebutkan bahwa terdapat setidaknya lima faktor penentu dari sebuah gerakan sosial, (1) Organisasi Gerakan Sosial, (2) Pemimpin dan Kepemimpinan, (3) Sumber Daya dan Mobilisasi Sumber Daya, (4) Jaringan dan Partisipasi dan (5) Peluang dan Kapasitas Masyarakat. Meninjau faktor-faktor tersebut, menurut Edwards dan Kane (dalam Edwards & Gillham, 2014) sebagai salah satu faktor penentu keberlangsungan gerakan sosial sumber daya-sumber daya dalam konteks ini terbagi pada poin-poin sebagai berikut:

1. Sumber Daya Material (*Material Resources*)

Persamaan sifat yang dimiliki antara sumber daya manusia dan sumber daya material secara langsung membuatnya mudah dipahami. Ini berkenaan dengan keduanya yang cenderung bersifat *tangible* atau nyata. Lain dengan istilah material dalam bahasa ekonomi, di sini material diartikan sebagai gabungan antara apa yang dikenal dengan modal fisik dan finansial. Sumber-sumber tersebut bisa berupa moneter, hak milik, ruang kantor (bangunan), peralatan, dan perbekalan. Yang menarik dari sumber daya material adalah sumber moneter (uang), di mana dalam konteks gerakan sosial uang merupakan hal penting dan lebih fungsional dibandingkan dengan sumber daya lainnya.

2. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Dibandingkan dengan dengan beberapa sumber daya sebelumnya, sumber daya manusia bisa dikatakan lebih mudah untuk dimengerti. Sebab sifatnya yang lebih nyata atau berwujud memudahkannya untuk dipahami. Adapun kategori sumber daya manusia seperti tenaga kerja, pengalaman, keterampilan, dan keahlian. Meskipun begitu, pada tingkat tertentu sumber daya manusia pun dapat dipengaruhi oleh hak dan kendali tiap-tiap individu dalam mengontrol kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Dari segi partisipasi, sumber daya manusia banyak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor layaknya ekonomi dan ruang, relasi sosial, kewajiban, dan komitmen moral.

3. Sumber Daya Organisasi-Sosial (*Social-Organizational Resources*)

Secara umum sumber daya ini terbagi pada tiga bentuk general, yaitu infrastruktur, jaringan sosial, dan organisasi. Infrastruktur pada konteks sumber daya organisasi sosial ialah fasilitas-fasilitas publik yang dapat digunakan oleh khalayak luas, seperti jalanan, koneksi internet atau misalnya layanan pos. Adapun jaringan sosial yang dimaksudkan jaringan sosial yang dimiliki oleh sebuah aktor gerakan sosial baik organisasi maupun individu, yang melalui jaringan tersebut dapat diperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Dan terakhir, organisasi merupakan organisasi seperti pada umumnya.

Dalam buku yang ditulis oleh Sukmana (2016) organisasi yang dimaksud terbagi dua yaitu, organisasi-sosial yang disengaja (*Intentional Social-Organization*) dan organisasi-sosial sepadan (*Appropriable Social-Organization*). Perbedaan kedua organisasi ini berada pada tujuan awal dibangunnya sebuah organisasi. Organisasi-sosial yang disengaja misalnya diciptakan atau dibangun dengan khusus untuk gerakan sosial yang lebih lanjut. Sementara organisasi-sosial sepadan dibentuk tidak dengan tujuan gerakan, tapi para pihak-pihak penggerak memiliki kemungkinan untuk mengakses sumber daya melalui organisasi tersebut. Memang perbedaan yang mencolok dari

keduanya adalah proses didapatnya sebuah sumber daya, untuk mendapat sumber daya yang berasal dari organisasi-sosial disengaja, prosesnya cenderung mudah, sedangkan untuk organisasi-sosial sepadan perlu melalui proses kooptasi dan koordinasi yang panjang. Namun demikian, sumber daya yang dihasilkan dari keduanya dapat berperan besar dalam sebuah gerakan sosial.

4. Sumber Daya Kultural (*Cultural Resources*)

Sumber daya kultural dalam pembahasan mengenai mobilisasi sumber daya gerakan sosial adalah serangkaian produk budaya layaknya konsep mengenai suatu alat dan pengetahuan khusus yang dapat diakses secara umum tapi tidak banyak diketahui. Misalnya cara atau metode dalam melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Contoh sederhananya adalah pengetahuan mengenai tata cara untuk melakukan rapat, mengadakan press rilis, membentuk organisasi, dan bahkan menggunakan sesederhana dalam menggunakan sosial media.

Perbedaan sifat antara sumber daya moral dengan kultural ialah, sumber daya kultural memiliki sifat seperti tersedia secara luas, tingkat eksklusif yang rendah, kemudian dapat diakses/digunakan secara bebas. Sumber daya kultural juga berkaitan dengan produk-produk yang berhubungan dengan gerakan sosial seperti musik, literatur, majalah, berita, film dokumenter dan bahkan *podcast*.

5. Sumber Daya Moral (*Moral Resources*)

Moral dalam bidang gerakan sosial dapat dipahami sebagai dukungan atau *support* (*moral support*). Karena berdasarkan catatan Sukmana (2016) sumber daya moral dalam gerakan sosial meliputi legitimasi/hak kekuasaan, dukungan solidaritas, dukungan simpati, hingga dukungan tokoh maupun orang-orang terkenal. Dari segi sumber, kebanyakan asal sumber daya moral diperoleh dari sumber-sumber eksternal.

Berdasarkan sumber daya-sumber daya di atas, meskipun tergolong dan terhitung sedikit tetapi dampak-dampak yang diberikan terhadap suatu gerakan sosial tentu tidak sedikit. Bagi Edwards dan Kane (dalam Edwards & Gillham, 2014) selain sumber daya dibagi kepada lima jenis, mereka pun mengemukakan

empat mekanisme atau cara bagaimana para aktor gerakan sosial mampu memperoleh kelima sumber daya tersebut. Cara-cara tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Agregasi/Pengumpulan (*Aggregation*)

Agregasi atau pengumpulan sumber daya seperti namanya pengumpulan berarti usaha mengumpulkan sumber daya yang tersebar atau berada pada individu maupun kelompok. Ketika sumber daya telah terkumpul nantinya sumber daya tersebut akan dikonversikan oleh aktor gerakan sosial menjadi sumber daya yang kolektif. Setidaknya dua contoh sumber daya yang dapat dikumpulkan ialah sumber daya moral dengan publikasi individu maupun kelompok yang mendukung tujuan yang sama, lalu sumber daya kultural dapat dilakukan dengan membentuk forum pertukaran informasi seperti konferensi maupun konsolidasi.

2. Produksi Diri (*Self-Production*)

Produksi diri berarti para aktor baik itu seorang pemimpin maupun kelompok yang melakukan dan menginisiasi gerakan sosial menciptakan sumber daya atau menambah nilai pada sumber daya yang telah dikumpulkan. Tak jarang misalnya sebuah gerakan sosial menghasilkan music, bacaan, repertoar taktik hingga pembingkaiian tindakan kolektif. Lebih dari itu, gerakan sosial pun seringkali memicu terbentuknya organisasi baru baik itu berupa jaringan maupun koalisi yang disepakati secara bersama. Atau dalam tingkat yang paling sederhana misalnya perproduksian *merchandise* gerakan sosial seperti, kaos, gelas, poster, dan lain-lain.

3. Kooptasi/Pengambilan (*Co-optation/Appropriation*)

Mekanisme atau cara yang ketiga ini memiliki setidaknya terbagi pada dua jenis. Pertama kooptasi yang mengacu pada pemakaian sumber daya yang sudah dikumpulkan oleh kelompok gerakan sosial secara transparan dan dengan izin pihak kelompok serta disertai dengan izin kontrol sumber daya. Sedangkan *appropriation* atau pengambilan artinya eksploitasi secara diam-diam yang juga dikumpulkan dari berbagai kelompok lain. Intinya kooptasi berarti penggunaan

dengan izin, sementara pengambilan (*appropriation*) penggunaan sumber daya tanpa izin.

4. Perlindungan (*Patronage*)

Perlindungan atau patronase dalam konteks mekanisme perolehan sumber daya diartikan oleh Sukmana (2016) sebagai pemberian sumber daya kepada organisasi oleh individu atau kelompok. Banyak bentuk tentunya dalam patronase ini, misalnya pemberian hibah dan donasi oleh pihak swasta dalam ranah sumber daya material atau patronase keuangan. Selanjutnya dalam ranah sumber daya moral diberikannya pengakuan atau penghargaan atas pencapaian yang positif bagi organisasi gerakan sosial.

